

ASAS KEADILAN TERHADAP HAK & KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) SEMENTARA SAMESTA SENTRALAND CENGKARENG

Oleh:

Hanindito Arfebi Setyono¹ dan Murti Pramuwardhani Dewi²

INTISARI

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pengaturan hak dan kewajiban pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Sementara Samesta Sentraland Cengkareng, serta mengetahui dan menganalisis PKWT di P3SRS Sementara Samesta Sentraland Cengkareng berdasarkan Asas Keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif empiris dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, serta metode penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada responden yakni para pihak yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dan data primer yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan disusun dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam PKWT di P3SRS Sementara Samesta Sentraland Cengkareng berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi dalam rumusan dan pelaksanaannya terdapat penyesuaian oleh Pengurus P3SRS Sementara Samesta Sentraland Cengkareng yang menimbulkan 4 (empat) penyimpangan atas landasan yang diacu, yaitu pekerja PKWT tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja PKWT tidak didaftarkan dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tidak adanya ketentuan dan pemberian Uang Kompensasi bagi pekerja PKWT yang mengundurkan diri, serta pekerja PKWT melakukan pekerjaan yang bersifat tetap. Atas hal tersebut, ketentuan hak dan kewajiban pada PKWT di P3SRS Sementara Samesta Sentraland Cengkareng belum memenuhi Asas Keadilan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Asas Keadilan, Hak dan Kewajiban, Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada – Kampus Jakarta

² Dosen Pembimbing Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE PRINCIPLE OF JUSTICE AGAINST RIGHTS & OBLIGATIONS IN TEMPORARY EMPLOYMENT AGREEMENT (PKWT) AT THE TEMPORARY OWNERS ASSOCIATION OF FLATS (P3SRS) SAMESTA SENTRALAND CENGKARENG

By:

Hanindito Arfebi Setyono³ dan Murti Pramuwardhani Dewi⁴

ABSTRACT

The thesis aims to discover and analyze the basis for regulating the rights and obligations of workers in a Temporary Employment Agreement (PKWT) at the Temporary Owners Association of Flats (P3SRS) Samesta Sentraland Cengkareng, as well as recognize and analyze the PKWT at the Temporary P3SRS Samesta Sentraland Cengkareng based on the Principle of Justice.

This research is a descriptive research with an empirical normative approach. The empirical normative research was carried out with library research methods to obtain secondary data related to research, and field research methods to obtain primary data by conducting interviews with respondents, namely the parties related to the research. Secondary data and primary data that have been obtained are then analyzed by qualitative methods and compiled by deductive methods.

Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the regulation of rights and obligations in the PKWT at the Temporary P3SRS Samesta Sentraland Cengkareng is based on Law Number 13 of 2003 about Manpower, Law Number 24 of 2011 about BPJS, and Law Number 11 of 2020 about Job Creation. However, in its deliberation and implementation there is an adjustment by the Temporary P3SRS Samesta Sentraland Cengkareng that causes 4 (four) deviations from the referred foundation, namely PKWT workers are not registered as BPJS Employment participants, PKWT workers are not registered in the program Job Loss Guarantee, there is no provision and compensation for PKWT workers who resign, as well as PKWT workers doing permanent work so that the provisions of the rights and obligations of PKWT in Temporary P3SRS Samesta Sentraland Cengkareng haven't fulfilled the Principle of Justice as it should.

Keywords: Justice Principle, Rights and Obligations, Worker, Temporary Employment Agreement (PKWT)

³ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada – Kampus Jakarta

⁴ Dosen Pembimbing Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada